

**PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**



Diajukan Untuk Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
NOVIANTO INDRATNO
B 200130386

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA
MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:
NOVIANTO INDRATNO
B 200130386

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Dosem Pembimbing


Dra. MUJIYATI, M.Si.
NK. 0610056605

HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

Yang Ditulis Oleh:

NOVIANTO INDRATNO
B 200130386

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Sabtu, 15 Juli 2017
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dra. Mujiyati, M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Fatchan Achyani, SE., M.Si.
(Anggota Dewan Penguji 1)
3. Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si.
(Anggota Dewan Penguji 2)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Dr. Syamsudin, M.M.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Juli 2017

Penulis



NOVIANTO INDRATNO
B200130386

**PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antar variabel yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio ketergantungan daerah terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Departemen Keuangan yang berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012-2014 yang disusun berdasarkan PP No. 24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan rasio efektivitas dan rasio ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Kata kunci : alokasi belanja modal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect between variables, namely the ratio of regional independence, effectiveness ratio, efficiency ratio and the ratio of regional dependence on the allocation of capital expenditure in the district / city in Central Java Province in 2012-2014.

This research uses quantitative descriptive research type. The data used in this study is secondary data obtained from the Ministry of Finance in the form of local government financial statements of 2012-2014, prepared under the PP. 24 of 2004 on Governmental Accounting Standards.

The results of this study indicate that the ratio of regional independence and efficiency ratio affect the allocation of capital expenditure, while the ratio of effectiveness and the ratio of regional dependence does not affect the allocation of capital expenditure.

Keywords: capital expenditure allocation, effectiveness ratio, efficiency ratio, regional dependency ratio, regional independence ratio.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi landasan utama dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. Otonomi daerah pada hakekatnya adalah untuk mendekatkan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dan memberikan kebebasan yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah (Arsa dan Setiawan, 2015).

Menurut Halim (2009) didalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah *self supporting* di dalam bidang keuangan. Artinya, daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Menurut Sularso dan Restianto (2011) rasio ketergantungan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2007).

Rasio efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output

tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Rondonuwu dkk, 2015). Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Arsa dan Setiawan, 2015).

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP Nomor 58 tahun 2005, pasal 4 tentang Asas Umum Pengelolaan Daerah).

Menurut Mardiasmo (2002) kewenangan yang selama ini diberikan kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justru ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik (Kuncoro, 2004). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian mengenai “PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji mengenai pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008) penelitian deskriptif kuantitatif yaitu dimana penelitian akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini akan dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut.

2.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh yaitu teknik penyampelan bila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota dalam kurun waktu selama 3 tahun dari tahun 2012-2014.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Departemen Keuangan yang berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012-2014. www.depkeu.kemenkeu.go.id.

2.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.4.1. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2012:4) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal dari tahun 2012-2014.

Menurut Halim (2007:101) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Formula dari alokasi belanja modal menurut Hidayat (2013) dan Halim (2007) terdapat kesamaan yaitu:

$$AlokasiBelanjaModal = \frac{BelanjaModal}{Total Realisasi Belanja daerah} \times 100\%$$

2.5. Variabel Independen

2.5.1. Rasio Kemandirian Daerah

Menurut Arsa dan Setiawina (2015) rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern.

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Formula dari rasio kemandirian daerah menurut Mahmudi (2011:170) dan Halim (2007) terdapat kesamaan yaitu:

$$RasioKemandirian = \frac{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

2.5.2. Rasio Efektivitas

Menurut Rondonuwu (2015) Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan output. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi (Wahyuni, 2007).

Formula dari rasio efektifitas daerah menurut Pramono (2014: 23) dan Halim (2002) terdapat kesamaan yaitu:

$$EK = \frac{Realisasi Penerimaan PAD}{Target penerimaan PAD} \times 100\%$$

berdasar potensi riil daerah

2.5.3. Rasio Efisiensi

Menurut Rondonuwu dkk (2015) efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Deddy dan Ayuningtyas (2010) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara output dan input (Halim, 2007).

Formula dari rasio efisiensi daerah menurut Wiratna (2015) dan Halim (2007) terdapat kesamaan yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

2.5.4. Rasio Ketergantungan Daerah

Menurut Haryadi (2002) tingkat ketergantungan adalah tingkat untuk mengukur kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Ketergantungan keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah pada pemerintah pusat/provinsi (Sularso dan Restianto, 2011).

Formula dari rasio ketergantungan daerah menurut Arsa (2015) dan Halim (2007) terdapat kesamaan yaitu:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program *SPSS* sebagai alat untuk menguji data. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Dikarenakan variabel independennya lebih dari satu, maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear Berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen. Adapun persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$BM = a + b_1RKD + b_3REV + b_4EFS + b_2RKGD + e$$

keterangan:

BM	=	belanja modal
a	=	bilangan konstanta
b	=	koefisien regresi
RKD	=	rasio kemandirian daerah
REV	=	rasio efektivitas
REF	=	rasio efisiensi
RKGD	=	rasio ketergantungan daerah
<i>e</i>	=	error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengujian Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,337 sehingga semua variabel diketahui lebih besar dari α ($p > 0,05$), maka dapat dinyatakan data residual berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 (10%) dan hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki VIF kurang dari 10, artinya tidak ada kolerasi antar variabel independen. Jadi dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan *p-value* kurang dari 0,05. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson (*d*) sebesar 1,647, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi karena nilai *d* berada diantara antara -2 sampai dengan 2.

3.2. Pembahasan Hasil Penelitian

3.2.1. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan uji t diketahui bahwa Rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, yang dibuktikan dengan nilai t_{hitung} untuk variabel Rasio kemandirian sebesar 2,279 lebih besar dari t_{tabel} 1,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, apabila tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal pemerintah pusat dan provinsi rendah, maka kemandirian suatu daerah akan semakin tinggi. Akan tetapi apabila kemandirian suatu daerah turun, maka ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin tinggi. Dapat diindikasikan bahwa apabila pendapatan asli daerah tinggi maka alokasi belanja modal dapat terealisasi dengan lancar.

3.2.2. Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan uji t diketahui bahwa Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, yang dibuktikan dengan nilai t_{hitung} untuk variabel Rasio efektivitas sebesar 1,304 lebih kecil dari t_{tabel} 1,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,195 lebih besar dari 0,05. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh pemerintah daerah tidak dapat merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah itu sendiri. Akibatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat cenderung diabaikan sehingga pengalokasian belanja modal tidak terealisasi dengan efektif dan dapat menghambat pembangunan dalam meningkatkan fasilitas pelayanan publik.

3.2.3. Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan uji t diketahui bahwa Rasio efisiensi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, yang dibuktikan dengan nilai t_{hitung} untuk variabel Rasio efisiensi sebesar 2,992 lebih besar dari t_{tabel} 1,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Efisiensi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal yang artinya suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya tinggi. Suatu

kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan, jika nilai efisiensi tinggi maka jumlah belanja diindikasikan sangat tinggi.

3.2.4. Pengaruh Rasio Ketergantungan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan uji t diketahui bahwa Rasio ketergantungan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, yang dibuktikan dengan nilai t_{hitung} untuk variabel Rasio evektifitas sebesar 0,657 lebih kecil dari t_{tabel} 1,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,513 lebih besar dari 0,05. Kondisi ini berarti pemerintah daerah tidak mampu dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan tetap tinggi dan alokasi belanja modal tidak dapat didistribusikan secara normal.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan rasio efektivitas dan rasio ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

4.3. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Untuk itu terdapat beberapa saran yang perlu dikemukakan agar penelitian selanjutnya dapat memperbaikinya agar lebih baik lagi, antara lain: (1) Penelitian selanjutnya dapat menambah dan memperpanjang periode waktu penelitian. (2) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel inidkator kinerja lainnya yang belum pernah diteliti sebelumnya. (3) Metode pengumpulan data perlu ditambahkan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap yaitu bisa dilakukan konfirmasi yang lebih mendalam dengan cara wawancara agar data yang dihasilkan dapat lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Arsa, Ketut dan Nyoman Djinar Setiawan. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali tahun 2006 s.d 2013. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 20. No. 2.
- Boedi, Soelistijono. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. *Jurnal SPREAD-Oktober 2012*, Vol. 20. No. 2.
- Fajar Hidayat, Mochamad. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang*.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, A. 2007. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Jatitmas, Rilo. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 11 No. 1.
- Lestari, Yunia Ike. 2012. Pengaruh Indikator Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Martini, Kadek dan A.A.N.B. Dwirandra. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 10. No 2. ISSN: 2302-8556.
- Machmud, Masita,dkk. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 14. No. 2 - Mei 2014.

- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada pemerintah kota Surakarta). Among Makarti, Vol.7 No.13.
- Rahmayati Anim. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Jurnal EKA CIDA, Vol. 1 No. 1. ISSN: 2503-3565 e-ISSN: 2503-3689.
- Rondonuwu H. Ritno,dkk. 2015. Analisi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA 23, Vol.3 No.4. ISSN: 2303-1174.
- Santoso, Singgih. 2000. SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Sijabat, Mentari Yosephen,dkk. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Malang tahun anggaran 2008-2012). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 , No. 2.
- Sularso Havid dan Yanuar E.Restianto. 2011. Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Media riset akuntansi, Vol. 1. No. 2. ISSN: 2088-2106.
- Vella KF, M. Rasuli, dan Alfiati Silfi. 2014. Pengaruh rasio keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2009-2012. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Riau.